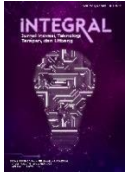


Integral: Jurnal Inovasi, Teknologi Terapan, dan Litbang

Volume 3 No 2 (2024), Halaman: 87-107

e-ISSN: 2961-8274, p-ISSN: 2962-0201

Journal Homepage: <https://jurnal.purworejokab.go.id/index.php/integral>



Memahami Strategi Pemerintah: Bantuan Subsidi Upah sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi

Yujitia Ahdarrijal¹, Putri Alya Azzahra², Yuyun Andriani³, Galih

Prasongko⁴, Teguh Satria⁵ ✉

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ^(1,5), Universitas Negeri Mataram ⁽²⁾,
Institut Agama Islam Hamzanwadi ⁽³⁾, Institut Pemerintahan Dalam Negeri ⁽⁴⁾

✉ y.ahdarrijal.psc23@mail.umy.ac.id

Kata kunci:

Bantuan Subsidi
Upah, Kemenaker,
Kemiskinan,
Indonesia

Keywords:

Wage Subsidy
Assistance,
Ministry of
Manpower,
Poverty, Indonesia

Abstrak

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang ada di setiap negara. Negara-negara di dunia terus berupaya untuk mengurangi dan memulihkan perekonomian melalui berbagai bentuk kebijakan. Pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan berupa Bantuan Subsidi Upah dari kementerian Ketenagakerjaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah melihat efektivitas dari pelaksanaan kebijakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan berbagai strategi demi pemulihan perekonomian di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif destruktif, studi literatur melalui scopus dan scholar. Hasil dari penelitian ini adalah, Kebijakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari kemenaker efektif menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dengan jumlah 25.90 Juta Jiwa dengan persentase terendah selama 2017 dengan persentase 9.36%. Adapun strategi dalam implementasinya adalah dengan penggunaan system yang baik dan terukur serta edukasi kepada beberapa unsur Masyarakat seperti pengusaha, dan kelompok Masyarakat menengah kebawah tentang penggunaan dana dari BSU Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Abstract

Poverty is a problem that exists in every country. Countries in the world continue to strive to reduce and restore the economy through various forms of policies. The Government of Indonesia implements a policy in the form of Wage Subsidy Assistance from the Ministry of Manpower. The purpose of this study is to see the effectiveness of the implementation of the Wage Subsidy Assistance (BSU) policy with various strategies for economic recovery in Indonesia. The methods used in this study are destructive qualitative methods, literature studies through scopus and scholar. The result of this study is that the Wage Subsidy Assistance Policy (BSU) from the Ministry of Manpower is effective in reducing poverty in Indonesia with a total of 25.90 million people with the lowest percentage during 2017 with a percentage of 9.36%. The strategy in its implementation is the use of a good and measurable system and education to several elements of the community such as entrepreneurs, and middle to lower community groups about the use of funds from the BSU of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia.



DOI: <https://doi.org/10.57122/integral.v3i2.42>

1. LATAR BELAKANG

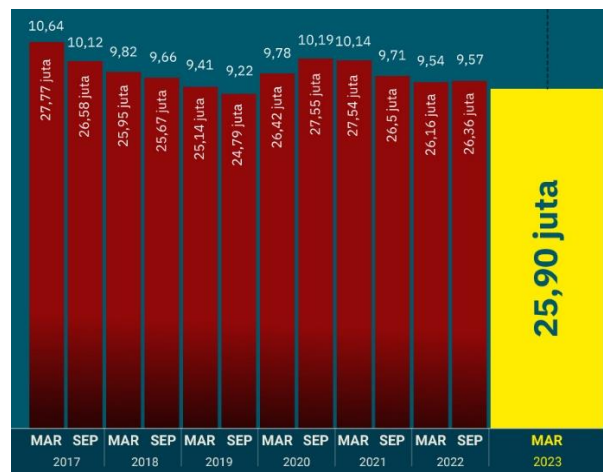
1.1. Pendahuluan

Di berbagai dunia, kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang sangat serius (Bierkamp et al., 2023). Kemiskinan adalah fenomena kompleks yang menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan social (Costa-Font & Knust, 2023; Nciweni et al., 2023). Jutaan orang hidup di bawah garis kemiskinan karena keterbatasan akses Pendidikan (Hartmann et al., 2023), Kesehatan (Moffitt et al., 2023), dan pekerjaan layak (Brown et al., 2023). Masalah ini diperparah oleh ketidakstabilan ekonomi, konflik, dan perubahan iklim (Grooms et al., 2023). Rendahnya upaya distribusi kekayaan, korupsi, dan ketidaksetaraan gender juga menjadi factor (Sullivan et al., 2023). Kemiskinan berdampak pada kesejahteraan individu dan masyarakat secara menyeluruh (White, 2023), menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Solusi memerlukan kolaborasi internasional, kebijakan inklusif, dan investasi dalam pendidikan serta pekerjaan yang berkelanjutan (Peng & Wang, 2023).

Ketidaksetaraan pendapatan, akses terbatas ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta kurangnya pekerjaan layak adalah faktor utama (Chen et al., 2023). Kesenjangan antarwilayah dan kurangnya infrastruktur di daerah terpencil juga memperburuk situasi (Shiljas et al., 2023). Selain itu, pandemi COVID-19 memperparah kemiskinan dengan dampak ekonomi yang signifikan (George et al., 2023; Tsai et al., 2023). Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini melibatkan program perlindungan sosial, peningkatan pendidikan, dan pembangunan ekonomi inklusif (Zhang et al., 2023). Meskipun progres telah dicapai, tantangan tersebut tetap mendesak dan memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai perubahan yang signifikan (Dragomir & Dumitru, 2023).

Penting untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan agar masyarakat dapat bersaing di pasar kerja global (She et al., 2023). Pemberdayaan perempuan, reformasi agraria, dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir juga perlu diperhatikan. Selain itu, transparansi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat menjadi solusi jangka Panjang (Khusainov et al., 2023). Peningkatan investasi dalam sektor pertanian dan mikro bisnis lokal dapat menciptakan peluang ekonomi di tingkat Masyarakat (Karan et al., 2023). Dengan pendekatan holistik dan kolaboratif, Indonesia dapat membangun fondasi yang kuat untuk mengatasi kemiskinan dan mencapai pembangunan berkelanjutan (Cai, 2023; Lucero-Prisno et al., 2023).

Figure 1. Data Kemiskinan di Indonesia Periode 2017-2023



Source: Badan Pusat Statistik

Data kemiskinan di Indonesia per periode Maret 2023 menempuh angka 25.90 juta jiwa yang artinya telah menurun dari periode Maret-September di angka 26.16 dan 26.36 juta. Pada tabel ini juga memperlihatkan angka kemiskinan dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti tahun 2017 dibulan Maret 27.77 juta jiwa dengan penurunan 10.64%, September 26.58 juta jiwa dengan persentase penurunan 10.12%. Tahun 2018 Maret 25.95 juta jiwa dengan persentase 9.82%, kemudian pada September 25.67 juta jiwa dengan penurunan 9.66%. Tahun 2019 angka kemiskinan 25.14 juta jiwa dengan penurunan 9.41%, dan pada September 24.79 juta jiwa dengan persentase 9.22%. Di tahun 2020 kemiskinan menginjak angka 26.42 juta jiwa dengan persentase 9.78% dan 27.55 juta jiwa dengan persentase 10.19%. Kemudian pada tahun 2021 menginjak angka 27.54 juta jiwa dengan persentase 10.14% dan pada Septemhernya 26.5 juta jiwa dengan 9.71%. Tahun 2022 menyentuh angka 26.16 juta jiwa dengan persentase 9.54%, terakhir pada Septemhernya 26.36 juta jiwa dengan persentase 9.57%. Dan yang terakhir pada tahun 2023 yang terendah pada Maret tercatat ada 25.90 juta jiwa dengan penurunan 9.36%.

Untuk meminimalisir kesenjangan dan kemiskinan di berbagai negara perlu adanya kebijakan. Kebijakan yang baik harus di dukung oleh aktor-aktor di dalamnya, seperti pemerintah, pihak swasta, dan juga civil society (da Silva Neto et al., 2023). Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengentas kemiskinan dan ketimpangan telah diimplementasikan melalui berbagai strategi, salah satunya adalah kebijakan bantuan subsidi upah atau BSU. Bantuan ini bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada masyarakat yang berada di lapisan ekonomi rendah, khususnya bagi mereka yang memiliki pendapatan bulanan di bawah Rp 3.5 juta. Sejak diberlakukan, program ini telah membuktikan efektivitasnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini. <https://bsu.kemnaker.go.id/>. Penerima bantuan subsidi upah dinyatakan berdasarkan sejumlah kriteria, termasuk pendapatan bulanan yang tidak melebihi batas tertentu. Salah satu syarat utama untuk menjadi penerima BSU adalah memiliki pendapatan bulanan di bawah Rp 3.5 juta. Dengan cara ini, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkannya.

Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kebijakan bantuan subsidi upah. Evaluasi secara berkala dilakukan untuk memastikan bahwa program ini tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika ekonomi dan sosial yang terus berubah. Pemerintah juga berusaha untuk lebih memperluas cakupan program, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini.

Banyak sarjana telah melakukan penelitian mengenai kebijakan dalam mengentas kemiskinan, namun masih hanya berfokus pada infrastruktur, suprastruktur, dan berfokus pada Pendidikan, sosial, dan psikologi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Chuang et al., 2023; Li et al., 2023; Obeta et al., 2023; Ravalier et al., 2023; Tamura et al., 2023; Tihelková, 2023).

Namun demikian, belum banyak membahas mengenai sudut pandang strategi dan Langkah konkrit dari implementasi sebuah program di sebuah negara, terutama penelitian yang berlokasi di Indonesia. Sehingga tujuan dari penelitian kali ini adalah untuk melihat dan memahami strategi dari pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan Kebijakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari kementerian ketenagakerjaan ini, efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan.

1.2. Tinjauan Pustaka

Kebijakan merupakan seperangkat tindakan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah (Santanna, 2023), organisasi (Nieto-Gonzalez et al., 2023), atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu Masyarakat (Ostrovskaya et al., 2023; Wartiainen, 2023). Kebijakan dapat berkaitan dengan berbagai bidang, termasuk ekonomi (Matulová, 2023), sosial (Quyet et al., 2023), Pendidikan (Hendri et al., 2023), lingkungan, dan lainnya (Bizel, 2023). Tujuan utama kebijakan adalah untuk menyelesaikan masalah, merespons kebutuhan masyarakat, atau menciptakan perubahan yang diinginkan (Tran-Thi-Thanh & Nguyen-Thi-phuong, 2023). Proses pembuatan kebijakan melibatkan identifikasi masalah, formulasi tujuan, penelitian dan analisis, pemilihan opsi kebijakan, implementasi, dan evaluasi dampak (Henaway, 2023). Kebijakan dapat dihasilkan oleh pemerintah sebagai respons terhadap perubahan dalam dinamika masyarakat atau sebagai upaya untuk mengatasi isu-isu tertentu. Kebijakan dapat bersifat formal, diwujudkan dalam undang-undang, peraturan, atau keputusan resmi, atau bersifat informal, seperti norma-norma sosial atau pedoman organisasi (Abdekhoda & Dehnad, 2023). Keberhasilan kebijakan sering kali diukur berdasarkan efektivitas implementasi dan dampaknya terhadap masyarakat atau lingkungan (Skare et al., 2023).

Efektivitas program merujuk pada sejauh mana suatu program atau kebijakan pemerintah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang diinginkan (Mullan, 2023). Menurut Hengevoss, (2023) Untuk mengevaluasi efektivitas suatu program, beberapa aspek perlu dipertimbangkan. Pertama, program harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur agar dapat diukur keberhasilannya. Indikator kinerja dan parameter evaluasi harus dirumuskan dengan cermat untuk memastikan program dapat diukur secara obyektif. Kedua, implementasi program harus dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan perencanaan. Efektivitas program tidak hanya tergantung pada tujuannya, tetapi juga pada kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan tepat waktu dan sumber daya yang tersedia. Ketiga, respons terhadap program perlu dievaluasi untuk menentukan dampaknya terhadap masyarakat atau target yang dituju. Evaluasi ini mencakup analisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan oleh program. Keempat, adaptabilitas program terhadap perubahan kondisi atau kebijakan yang mungkin terjadi selama implementasi juga menjadi faktor penting dalam menilai efektivitasnya. Efektivitas program menjadi kunci dalam menilai nilai tambah dan keberlanjutan kebijakan pemerintah (Valentine, 2023; Vankov & Vankov, 2023; Yurrebaso et al., 2023). Evaluasi yang teliti akan membantu pembuat kebijakan untuk memahami keberhasilan program (Mozer et al., 2023), mengidentifikasi potensi perbaikan (Pringle et al., 2023), dan memastikan alokasi sumber daya yang optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan (Anand et al., 2023).

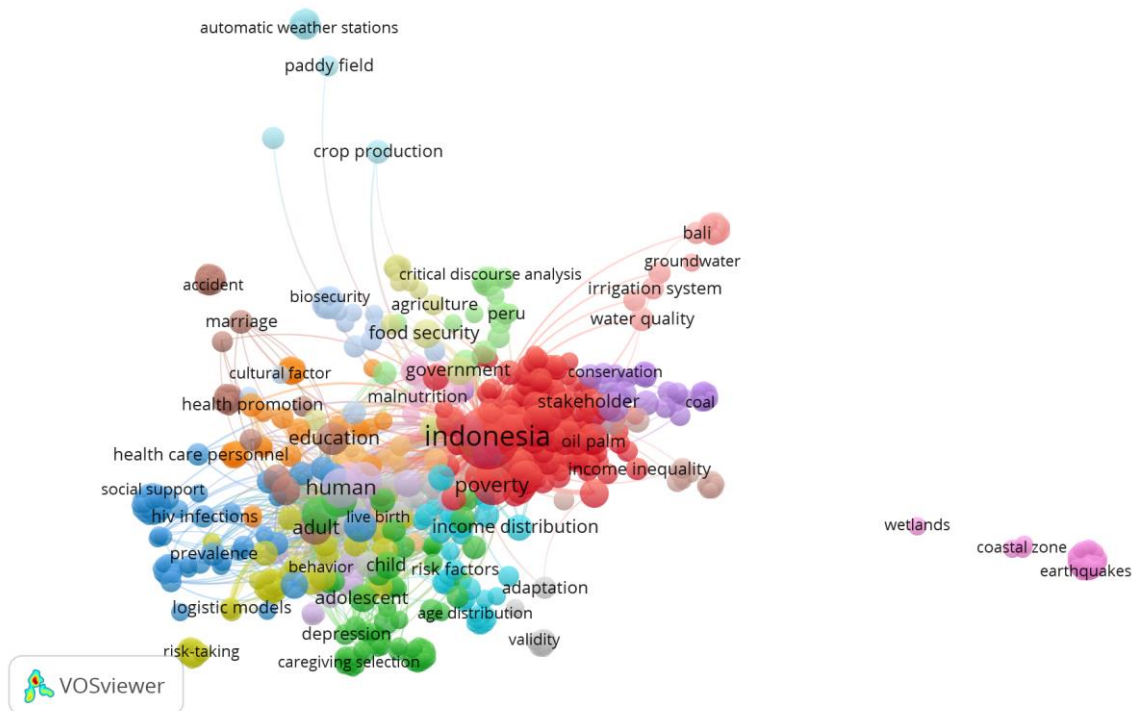
2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini dipilih karena memiliki potensi untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti, yang mana peneliti secara kritis mengevaluasi berbagai bahan pustaka yang relevan dengan materi jurnal yang akan dijadikan acuan. Langkah ini bertujuan untuk membangun dasar teoritis yang solid dan memastikan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap literatur yang sudah ada dengan pendekatan studi literatur melalui jurnal nasional dan internasional bereputasi yang berasal dari Scopus dan Scholar mengenai Bantuan Subsidi Upah Kementrian Ketenagakerjaan di Indonesia, yang kemudian dalam analisis datanya menggunakan Vosviewer untuk melihat hubungan serta menganalisis mengenai Bantuan Subsidi Upah tersebut dalam mengentas kemiskinan di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan dan perekonomian di Indonesia merupakan dua aspek yang saling terkait dan memengaruhi kehidupan Masyarakat (Brevik et al., 2023). Meskipun terdapat kemajuan ekonomi, tantangan kemiskinan tetap menjadi permasalahan serius. Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan ekonomi dan kesenjangan pendapatan, terutama di daerah-daerah pedalaman dan perkotaan yang terpinggirkan. Faktor-faktor seperti kurangnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta kurangnya peluang pekerjaan formal, turut berkontribusi pada tingginya tingkat kemiskinan (Finlay et al., 2023). Pemerintah Indonesia terus berupaya mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi kemiskinan, termasuk program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penguatan sektor ekonomi mikro dan menengah, peningkatan akses pendidikan, dan pembangunan infrastruktur menjadi fokus untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Meskipun demikian, tantangan struktural dan perluasan peluang ekonomi tetap menjadi area kritis yang harus diatasi agar upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Figure 2. Olahdata Vosviewer Kemiskinan di Indonesia



Source: *Vosviewer*

Berdasarkan data gambar disamping, kemiskinan yang diamati di Indonesia menunjukkan beberapa hal yang bisa mempengaruhi kemiskinan, diantaranya adalah adanya keterlibatan stakeholder antara beberapa actor, seperti pihak swasta, pihak pemerintah dan juga beberapa pihak ketiga. Stakeholder yang tergabung turut serta membantu untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Salah satu yang menjadi sektor penting kali ini adalah dari kementerian Ketenagakerjaan. Kebijakan dalam memberikan berupa Bantuan yang diberikan kepada Masyarakat yang memiliki kriteria tertentu sebagai penerima upah sebesar Rp3.500.000

Rupiah untuk membantu Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pada hal ini keberhasilan sebuah kebijakan bantuan sosial sangat bergantung pada kecepatan dan akurasi dalam pendataan penerima manfaat. Jika jaringan pendataan mengalami gangguan atau kegagalan, proses verifikasi menjadi terhambat, dan hal ini dapat memperlambat distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung jaringan pendataan agar dapat beroperasi secara optimal dan tidak terputus. Selain itu, penting juga untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan pada mekanisme pelaksanaan kebijakan.

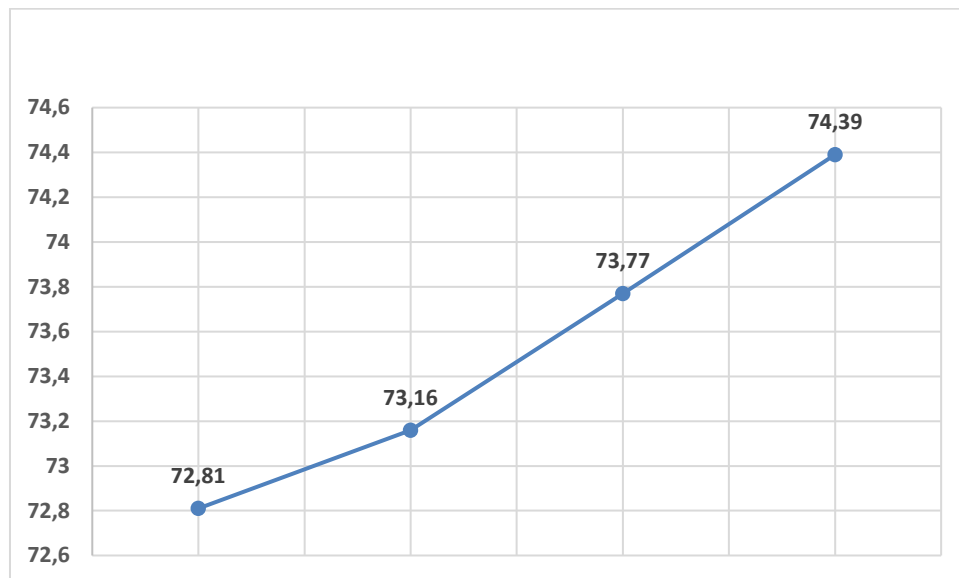
Proses koordinasi antar lembaga dan instansi terlibat perlu diperkuat untuk mengatasi potensi hambatan dan kendala yang muncul selama pelaksanaan. Peran koordinasi yang efektif dapat membantu mengoptimalkan kinerja setiap pihak yang terlibat, sehingga bantuan dapat disalurkan dengan lebih efisien (Amri & Amri, 2021). Selain masalah teknis, aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi fokus penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi terkait penerima bantuan BSU (Bantuan Subsidi Upah) dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan pihak terkait. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan, tetapi juga dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah adanya potensi penyalahgunaan bantuan. Dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul, pemerintah dapat mempertimbangkan penerapan solusi teknologi yang lebih canggih dan andal. Penggunaan sistem informasi terintegrasi dapat membantu mempercepat proses pendataan, verifikasi, dan distribusi bantuan. Selain itu, pelibatan ahli teknologi informasi yang kompeten dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem dapat menjadi investasi jangka panjang yang memberikan dampak positif pada efisiensi kebijakan. Sebagai langkah preventif, pemerintah juga dapat melakukan pelatihan rutin bagi petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan bantuan BSU (Bantuan Subsidi Upah).

Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan memerlukan manajemen yang cermat agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dengan efektif. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Salah satu contoh nyata dari risiko tinggi dalam pelaksanaan kebijakan adalah kasus yang melibatkan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2021. Pada tahun 2021 tersebut, BPJS Ketenagakerjaan, yang merupakan lembaga penyelenggara program perlindungan sosial di bidang ketenagakerjaan di Indonesia, menghadapi tantangan serius. Mereka terlibat dalam sebuah kasus korupsi yang mencengangkan, dengan nilai sebesar Rp4.750.500.000 (Aprilia, 2023). Angka tersebut mencerminkan sejauh mana korupsi dapat merugikan keuangan lembaga tersebut dan, pada akhirnya, mempengaruhi kredibilitasnya. Namun, perlu dicatat bahwa kasus korupsi tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan Bantuan Subsidi Upah (BSU). BSU merupakan program bantuan pemerintah yang bertujuan untuk membantu pekerja yang terdampak oleh situasi ekonomi sulit, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19. Meskipun BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas pelaksanaan BSU ketenagakerjaan, kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2021 tidak dapat disimpulkan sebagai penyalahgunaan dana BSU. Penyalahgunaan dana harus diminimalisir hingga nantinya dapat membawa kesejahteraan pada masyarakat di Indonesia.

Kesejahteraan erat kaitannya dengan perekonomian. Perekonomian yang berkembang cenderung memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan pendapatan per kapita, dan memberikan akses lebih baik terhadap sumber daya dan layanan. Adanya pekerjaan yang

tersedia memberikan masyarakat pendapatan yang stabil, yang pada gilirannya meningkatkan daya beli mereka. Dengan adanya daya beli yang lebih tinggi, masyarakat dapat mengakses barang dan jasa yang lebih banyak, termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan rekreasi. Jika kita melihat dari adanya efek dari Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kemenaker ini secara tidak langsung mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia dari tahun ke tahun.

Grafik 1. Indeks Pembangunan Manusia 2020-2023



Source: *Databoks.katadata*

Dari grafik diatas menunjukkan bahwasannya data indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan tren kenaikan yang positif. Pada tahun 2020, IPM mencapai 72.81, dan mengalami peningkatan sepanjang periode yang diukur. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 73.16, menunjukkan kemajuan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Kenaikan ini mencerminkan adanya kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup. Tren positif tersebut berlanjut hingga tahun 2022 dan 2023 dengan nilai IPM berturut-turut mencapai 73.77 dan 74.39. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Muhamad, 2023).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mengimplementasikan sejumlah strategi dalam kebijakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai respons terhadap dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi. Salah satu strategi utama yang diadopsi adalah pendekatan yang terarah, dengan menyasar pekerja yang membutuhkan bantuan secara khusus, termasuk mereka yang berada di sektor terdampak dan wilayah geografis tertentu. Selain itu, Kemenaker menjalin kerjasama dengan pihak swasta, melibatkan perusahaan dan sektor usaha untuk mendukung pemerintah dalam menyediakan bantuan kepada pekerja yang terdampak.

Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi fokus strategi, dengan diterapkannya sistem pendaftaran dan distribusi bantuan secara online. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan transparansi dalam proses penyaluran bantuan. Evaluasi berkala

dilakukan oleh Kemenaker untuk menilai dampak kebijakan BSU dan menyesuaikannya dengan kondisi ekonomi yang terus berubah. Selain itu, edukasi dan komunikasi aktif kepada masyarakat, termasuk pekerja dan pengusaha, menjadi strategi penting untuk memastikan pemahaman yang baik tentang syarat, prosedur, dan manfaat BSU.

Melalui pendekatan yang terarah, BSU berhasil menyentuh lapisan pekerja yang membutuhkan bantuan ekonomi tambahan, terutama mereka yang berada di sektor-sektor terdampak dan wilayah tertentu. Pemberian subsidi upah membantu meringankan beban ekonomi pekerja, memastikan kelangsungan pendapatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian, terjadi peningkatan konsumsi domestik, yang merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Perusahaan yang mendapatkan dukungan juga dapat menjaga keberlanjutan operasionalnya, mengurangi risiko PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dan berkontribusi pada stabilitas sektor ketenagakerjaan.

Pemanfaatan teknologi digital dalam proses pendaftaran dan distribusi BSU meningkatkan efisiensi dan transparansi, yang pada gilirannya menciptakan tata kelola yang baik. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih percaya pada kebijakan pemerintah dan merasa dihargai, yang berpotensi meningkatkan partisipasi dalam aktivitas ekonomi. Edukasi yang aktif dan komunikasi yang baik juga memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang manfaat dan prosedur BSU.

Ketidaksesuaian antara kasus korupsi dan bantuan BSU menyoroti pentingnya pemisahan dan pengawasan yang ketat dalam lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun suatu lembaga memiliki tanggung jawab terhadap berbagai program, masing-masing program tersebut harus dikelola secara independen dan transparan agar dapat mencapai tujuan kemanfaatan masyarakat. Peristiwa kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan pelajaran berharga tentang perlunya perbaikan sistem pengawasan internal dan eksternal. Penegakan integritas dan pencegahan korupsi harus menjadi fokus utama dalam manajemen lembaga-lembaga yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Langkah-langkah pencegahan, seperti audit yang ketat dan pelaporan transparan, menjadi kunci untuk menghindari kasus-kasus serupa di masa depan. Penting untuk diingat bahwa meskipun terdapat kasus korupsi yang melibatkan lembaga tertentu, hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pentingnya bantuan yang diberikan kepada pekerja melalui program-program seperti BSU. Pemerintah perlu terus meningkatkan mekanisme pengawasan dan pengendalian agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

Dalam konteks ini, tanggung jawab pemerintah bukan hanya terbatas pada pelaksanaan kebijakan, tetapi juga pada upaya meningkatkan integritas dan akuntabilitas lembaga-lembaga yang terlibat. Dengan melakukan perbaikan dalam manajemen risiko, penguatan pengawasan, dan peningkatan transparansi, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak positif tanpa adanya penyalahgunaan wewenang atau dana. Langkah-langkah proaktif ini akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan memastikan bahwa setiap program bantuan yang diberikan memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/18/14294221/>

Kebijakan pemberian dana bantuan subsidi upah (BSU) telah menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan dukungan kepada para tenaga kerja yang memenuhi kriteria tertentu. Melalui kebijakan ini, pemberian bantuan dilakukan dengan memberikan dana kepada pekerja dalam bentuk subsidi upah, yang bertujuan untuk

membantu meringankan beban ekonomi mereka. Dana ini berasal dari Kementerian Tenaga Kerja dan memiliki besaran sebesar 600.000 Rupiah setiap kali pemberian upah (Kemenaker, 2022). Pada dasarnya, BSU merupakan salah satu langkah konkret pemerintah dalam mendukung kesejahteraan para pekerja yang terdampak situasi tertentu, seperti kondisi ekonomi yang sulit atau krisis. Pemberian subsidi upah ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui mekanisme dan kriteria tertentu agar tepat sasaran. Dalam hal ini, penerima BSU harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022. Peraturan tersebut memberikan landasan hukum dan ketentuan mengenai penyaluran BSU, sehingga proses pemberian bantuan dapat dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Kriteria penerima BSU mencakup berbagai aspek, seperti tingkat pendapatan, kondisi pekerjaan, dan faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan subsidi upah. Pentingnya BSU semakin terlihat pada tahun 2022, di mana pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 9,6 triliun Rupiah untuk program ini (CNBC, 2022). Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan finansial kepada para pekerja yang membutuhkan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi tantangan-tantangan tertentu.

Pelaksanaan pemberian bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melibatkan staf yang dapat dianggap cukup untuk menjalankan tugas-tugas terkait. Proses penyaluran bantuan ini didukung oleh beberapa lembaga, termasuk Pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Adanya kerja sama dengan lembaga-lembaga ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyaluran BSU dapat berjalan lancar dan efisien. Menurut keterangan yang diterima, penyaluran BSU pada tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat sisa sebesar 8,8% dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah (CNBC, 2022). Angka ini mencerminkan realitas pelaksanaan program subsidi upah, di mana beberapa faktor mungkin memengaruhi pencapaian target penuh. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis beberapa aspek terkait pelaksanaan program ini.

Pertama-tama, keberhasilan pelaksanaan program BSU tidak hanya tergantung pada jumlah staf yang terlibat, tetapi juga pada efektivitas sistem distribusi bantuan. Proses penyaluran melalui lembaga-lembaga seperti BPJS dan KPPN harus dirancang dengan baik untuk memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada para penerima dengan cepat dan tepat. Jika terdapat hambatan atau kendala dalam distribusi, hal ini dapat berkontribusi pada adanya sisa dari target yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan dan kontrol terhadap penyaluran BSU juga memegang peranan penting dalam mencapai target pemerintah. Kepatuhan terhadap pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan perlu diawasi secara ketat agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dana. Upaya pencegahan terhadap potensi masalah administratif atau korupsi harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan program subsidi upah. Adanya sisa 8,8% dari target pemerintah juga dapat mencerminkan adanya perubahan kondisi ekonomi atau sosial yang tidak terduga (CNBC, 2022). Faktor-faktor seperti fluktuasi jumlah pekerja yang memenuhi syarat, perubahan status ekonomi keluarga, atau bahkan perubahan dalam kebijakan pemerintah bisa memengaruhi realisasi dari target yang ditetapkan. Penting untuk mencatat bahwa meskipun terdapat sisa dari target, program BSU masih memberikan manfaat signifikan bagi pekerja yang membutuhkan. Bantuan ini dapat menjadi penopang ekonomi bagi keluarga yang terdampak oleh situasi sulit, seperti pandemi atau krisis ekonomi.

Pentingnya sistem yang terintegrasi antara Kemenaker, BPJS, dan KPPN menciptakan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait, efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran bantuan BSU dapat tercapai. Ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi penerima bantuan, tetapi juga menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani krisis dan memberikan dukungan kepada sektor pekerja. Peran teknologi informasi juga turut mendukung keberhasilan sistem administrasi ini (Doumit et al., 2023). Pemanfaatan sistem basis data dan aplikasi teknologi informasi mempercepat proses verifikasi, pemrosesan, dan pelaporan. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pekerja yang memerlukan bantuan dalam situasi darurat atau krisis, seperti yang terjadi selama pandemi. Dalam konteks ini, transparansi juga menjadi aspek krusial dalam membangun kepercayaan Masyarakat (McCosker et al., 2023). Melalui mekanisme pelaporan dan publikasi yang jelas, masyarakat dapat memantau dan menilai sejauh mana dana bantuan disalurkan dengan tepat dan adil. Ini menciptakan akuntabilitas yang tinggi dan menjadikan pemerintah sebagai lembaga yang dapat diandalkan dalam memberikan dukungan kepada warganya (Carraro, 2023).

Secara keseluruhan, sistem administrasi yang baik dan terorganisir dalam penyaluran bantuan BSU melibatkan kerjasama yang erat antara Kemenaker, BPJS, dan KPPN. Sinergi antara lembaga-lembaga ini menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, sementara pemanfaatan teknologi informasi memberikan akselerasi dalam proses administrasi. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam upaya pemerintah untuk memberikan dukungan kepada sektor pekerja dalam menghadapi tantangan ekonomi. <https://bsu.kemnaker.go.id/> . Pelaksanaan kebijakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Indonesia telah dilakukan dengan cermat dan terstruktur. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan bantuan kepada pekerja yang terdampak oleh situasi ekonomi, terutama selama pandemi. Proses penyaluran bantuan dilakukan melalui lembaga-lembaga yang telah bekerja sama dan memiliki kewenangan dalam mengelola dana bantuan BSU.

Tabel 1. Stakeholder Penyaluran BSU

	KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN	
BPJS KETENAGAKERJAAN		PT. POS INDONESIA
	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA	

Source: *Kemnaker RI*

Salah satu kementerian yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kemnaker berperan sebagai lembaga yang mengoordinasikan penyaluran bantuan dari pemerintah kepada penerima manfaat. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Setelah melewati proses koordinasi di tingkat kementerian, bantuan BSU kemudian disalurkan kepada beberapa lembaga mitra, antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang berperan penting dalam perlindungan sosial bagi pekerja di Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk menyalurkan bantuan kepada pekerja yang telah

terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain BPJS Ketenagakerjaan, PT Pos Indonesia juga menjadi salah satu mitra dalam penyaluran bantuan BSU. PT Pos Indonesia memiliki jangkauan yang luas di seluruh wilayah Indonesia, sehingga mereka dapat membantu menjangkau penerima manfaat di berbagai daerah. Peran PT Pos Indonesia tidak hanya sebatas sebagai penyedia layanan logistik, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendukung efisiensi penyaluran bantuan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) juga terlibat dalam proses penyaluran bantuan subsidi upah. KPPN memiliki peran khusus dalam menangani aspek keuangan dan administrasi terkait dengan penyaluran dana bantuan. Mereka memastikan bahwa proses keuangan terkait dengan BSU berjalan dengan lancar, termasuk pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana.

Pentingnya melibatkan lebih dari satu lembaga dalam pelaksanaan kebijakan terletak pada potensi sinergi dan kolaborasi yang dapat tercipta (Cattan et al., 2023). Dalam banyak kasus, kebijakan yang melibatkan berbagai sektor dan aspek kehidupan masyarakat tidak dapat dijalankan dengan baik jika hanya satu lembaga yang bertanggung jawab (Fedeli & Taylor, 2023). Oleh karena itu, kolaborasi antarlembaga menjadi kunci untuk mengoptimalkan hasil dari implementasi kebijakan. Salah satu keuntungan utama dari melibatkan beberapa lembaga adalah peningkatan efektivitas. Dengan adanya berbagai keahlian dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap lembaga, implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan lebih baik. Misalnya, jika sebuah kebijakan melibatkan bidang kesehatan dan pendidikan, melibatkan lembaga-lembaga yang ahli di kedua bidang tersebut akan memastikan bahwa aspek-aspek khusus dari kebijakan tersebut dapat ditangani dengan baik (Kazakbaeva, 2023).

Selain efektivitas, efisiensi juga menjadi faktor penting yang diperoleh melalui kolaborasi lembaga. Dengan saling berbagi tanggung jawab dan sumber daya, lembaga-lembaga yang terlibat dapat menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan (Chowa et al., 2023). Hal ini dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Sebagai contoh, jika satu lembaga bertanggung jawab atas distribusi bantuan keuangan dan lembaga lain bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi, keduanya dapat bekerja secara bersama-sama tanpa saling mengganggu. Pentingnya evaluasi dan monitoring dalam kebijakan bantuan BSU juga dapat dipermudah melalui keterlibatan beberapa lembaga. Dengan adanya berbagai perspektif dan pendekatan, evaluasi dapat dilakukan dengan lebih komprehensif. Setiap lembaga dapat memberikan kontribusi uniknya, sehingga hasil evaluasi menjadi lebih akurat dan dapat digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang (Jung & Hajjar, 2023).

Selain itu, keterlibatan beberapa lembaga juga memperkuat transparansi dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya mekanisme kolaborasi, informasi dapat dengan mudah dipertukarkan antarlembaga, dan masyarakat dapat memahami lebih baik tentang bagaimana kebijakan tersebut dijalankan. Transparansi ini menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, yang pada gilirannya dapat mendukung kesuksesan implementasi kebijakan.. <https://bsu.kemnaker.go.id/>. Kementerian Ketenagakerjaan saat ini berada di bawah kepemimpinan Hj. Ida Fauziyah, seorang pemimpin yang berdedikasi dan memiliki komitmen tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Kepemimpinan beliau tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan, salah satunya adalah penyelenggaraan bantuan subsidi upah (BSU) yang bertujuan memberikan dukungan kepada para pekerja yang membutuhkan.

BSU menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pemerintah untuk melindungi pekerja dari dampak ekonomi yang terjadi akibat berbagai krisis, termasuk pandemi global

yang sedang berlangsung. Dengan adanya BSU, diharapkan para penerima bantuan dapat memperoleh keringanan finansial dan tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, meskipun sedang menghadapi situasi sulit. Hj. Ida Fauziyah, sebagai pemimpin Kementerian Ketenagakerjaan, telah menunjukkan keahliannya yang mendalam di bidang ketenagakerjaan. Latar belakang pendidikannya yang terkait dengan pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menjadi modal penting dalam memahami dinamika dan kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan. Pendidikan yang diperolehnya memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pengalaman beliau dalam berbagai aspek pemerintahan juga turut membentuk perspektifnya terhadap isu-isu ketenagakerjaan. Kombinasi antara pengetahuan akademis dan pengalaman praktis menciptakan pemimpin yang mampu menghadapi tantangan kompleks di bidang ketenagakerjaan dengan solusi yang terukur dan berdaya tahan.

Pentingnya keberlanjutan kebijakan yang diterapkan di Kementerian Ketenagakerjaan di bawah kepemimpinan Hj. Ida Fauziyah adalah kunci kesuksesan dalam mencapai tujuan pembangunan sektor ketenagakerjaan. Upaya-upaya peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas, serta penanganan permasalahan ketenagakerjaan yang muncul memerlukan sinergi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program-program seperti BSU perlu dijaga dengan baik. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dan mengapresiasi upaya pemerintah dalam melindungi keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja. Kepemimpinan Hj. Ida Fauziyah di Kementerian Ketenagakerjaan tidak hanya menjadi tonggak penting dalam peningkatan kesejahteraan pekerja, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi pekerja dan pengusaha, diharapkan tercipta sinergi yang positif untuk mencapai visi bersama dalam menciptakan ketenagakerjaan yang produktif dan berdaya saing. <https://kemnaker.go.id/unit/biography/dr-hj-ida-fauziyah-msi>

Pimpinan dalam hal ini telah melaksanakan kebijakan pemberian dana bantuan Sembako (Bantuan Subsidi Upah/BSU) dengan pendekatan yang terstruktur, terperinci, dan sistematis sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Pentingnya pemberian bantuan ini menjadi lebih menonjol mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi global. Namun, meskipun langkah-langkah telah diambil untuk memastikan distribusi dana BSU berjalan lancar, beberapa kasus penyalahgunaan dan korupsi terkait BSU di Indonesia menunjukkan bahwa tantangan masih ada. Salah satu kasus yang mencuat adalah kasus korupsi dana BSU di Provinsi Bali. Pada tahun 2020, kepala Dusun Celuk Buluh di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terlibat dalam penyalahgunaan dana tersebut. Kasus ini menciptakan kekhawatiran dan memicu respons tegas dari perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali.

Dalam menanggapi kasus tersebut, perwakilan BPK RI dan BPKP Provinsi Bali mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan BSU. Mereka melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap beberapa pihak yang terlibat dalam penyelewengan dana tersebut. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memberantas praktik-praktik korupsi yang dapat merugikan masyarakat dan merusak integritas program bantuan sosial. Pentingnya langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap kasus korupsi BSU tidak hanya bersifat lokal tetapi juga

bersifat nasional. Koordinasi antarlembaga seperti BPK RI dan BPKP Provinsi Bali adalah kunci dalam menjamin efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Peningkatan kerjasama antarlembaga ini dapat menjadi dasar untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.

Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya melaporkan praktik-praktik penyelewengan dana bantuan. Transparansi dalam pelaporan dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dapat menjadi langkah proaktif untuk mencegah terjadinya penyelewengan di tingkat lokal maupun nasional. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama juga harus dilibatkan secara aktif dalam mengawasi penggunaan dana bantuan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Pemberantasan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial, termasuk BSU, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan lembaga pengawas, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Pembelajaran dari kasus-kasus seperti korupsi dana BSU di Provinsi Bali harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan bantuan sosial secara menyeluruh.

Pentingnya integritas dan keberlanjutan program bantuan sosial, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi, menjadi semakin nyata. Pemerintah, bersama dengan semua pemangku kepentingan, harus terus berupaya untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan pengawasan, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana bantuan. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, masyarakat dapat yakin bahwa bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak positif sesuai dengan tujuannya, yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan dengan adil dan efisien.

Pada masa kepemimpinan Hj. Ida Fauziah sebagai Menteri Ketenagakerjaan di era pemerintahan Joko Widodo, terlihat adanya indikasi bahwa beliau mampu menjalankan tugas kepemimpinan dengan optimal dan profesional. Hal ini terutama terlihat dalam kemampuannya untuk menjamin keberlangsungan kebijakan-kebijakan yang telah ada, dengan fokus khusus pada kebijakan pemberian bantuan subsidi upah atau BSU bagi para pekerja. Salah satu sorotan utama dalam kepemimpinan Hj. Ida Fauziah adalah implementasi kebijakan BSU yang menjadi program andalan dalam mendukung kesejahteraan pekerja. Meskipun pada awal-awal kepemimpinannya terdapat beberapa kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh sejumlah oknum di Provinsi Bali, namun seiring berjalannya waktu, terlihat perbaikan yang signifikan. Pada tahun-tahun berikutnya, pelanggaran etik dan penyelewengan atas dana BSU semakin minim sekali, mencerminkan ketegasan dan kedisiplinan dalam pengawasan pelaksanaan program tersebut.

Keberhasilan mengatasi permasalahan tersebut tidak lepas dari peran kepemimpinan Hj. Ida Fauziah yang mampu mengawal kebijakan BSU secara bersama-sama dengan berbagai pihak terkait. Kerjasama ini menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yakni memberikan bantuan secara tepat dan efisien kepada para pekerja yang membutuhkan. Dengan sinergi antara pemerintah dan berbagai unsur masyarakat, tujuan pemberian subsidi upah dapat tercapai dengan lebih efektif. Selain itu, terlihat pula bahwa Menteri Ketenagakerjaan Hj. Ida Fauziah tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum terkait pelanggaran etik, tetapi juga aktif dalam melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Penguatan sistem pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan dana BSU menjadi prioritas, sehingga risiko terjadinya penyelewengan semakin ditekan. Komitmen untuk meningkatkan kualitas kebijakan juga tercermin dari langkah-langkah inovatif yang diambil oleh Hj. Ida Fauziah. Terdapat upaya-upaya untuk terus memperbaiki proses distribusi BSU agar lebih efisien dan transparan. Hal ini menciptakan

lingkungan di mana pekerja dapat lebih percaya dan yakin bahwa bantuan yang mereka terima benar-benar mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah menjadi salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. Untuk memastikan efektivitas penyaluran BSU, beberapa lembaga telah turut serta dalam membantu proses ini. Proses penyaluran BSU melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pendataan hingga penyaluran dana kepada penerima manfaat. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam pendataan penerima BSU adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab untuk melakukan pendataan pekerja yang memenuhi kriteria penerima BSU. Proses pendataan ini dilakukan secara cermat dan terperinci guna memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang membutuhkannya. Setelah proses pendataan selesai, langkah selanjutnya adalah penyaluran dana BSU kepada penerima manfaat. Salah satu lembaga yang terlibat dalam proses ini adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). KPPN memiliki peran penting dalam menyalurkan dana BSU sesuai dengan data yang telah terverifikasi. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penyaluran berjalan lancar dan tepat waktu.

Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan KPPN menjadi kunci keberhasilan dalam penyaluran BSU. Kedua lembaga tersebut harus bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa proses pendataan dan penyaluran berjalan dengan efisien. KPPN perlu mengambil data yang telah diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan melakukan penyaluran dana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pentingnya peran lembaga-lembaga ini tidak hanya terletak pada aspek administratif, tetapi juga pada dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. BSU menjadi penyelamat bagi banyak pekerja yang terdampak langsung oleh pandemi. Dana subsidi yang diterima oleh para pekerja dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Selain BPJS Ketenagakerjaan dan KPPN, lembaga lain juga dapat terlibat dalam mendukung penyaluran BSU. Misalnya, lembaga keuangan atau bank yang dapat membantu dalam proses transfer dana secara elektronik kepada penerima manfaat. Kolaborasi antara berbagai lembaga ini penting untuk menciptakan sistem yang terintegrasi dan efisien dalam menangani penyaluran bantuan sosial.

Selain itu, transparansi dalam setiap tahap penyaluran juga menjadi hal yang krusial. Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas mengenai mekanisme pendataan, seleksi penerima, dan proses penyaluran dana. Hal ini dapat menghindari potensi kesalahpahaman dan menciptakan kepercayaan dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Di tengah dinamika penanganan pandemi, kebijakan Bantuan Subsidi Upah menjadi cermin dari kesungguhan pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Kerja sama antarlembaga, keterbukaan, dan akuntabilitas adalah kunci untuk memastikan bahwa bantuan ini benar-benar memberikan dampak positif bagi mereka yang membutuhkannya. Dengan sinergi yang baik antar lembaga, diharapkan penyaluran BSU dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengurangi beban ekonomi pekerja yang terdampak.

Pada tahun 2020, Provinsi Bali menjadi saksi dari kejadian yang mencoreng citra pemerintahan setempat. Penyelewengan dana bantuan BSU (Bantuan Subsidi Upah) yang dilakukan oleh kepala Dusun Celuk Buluh di desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, telah menciptakan dampak yang merugikan negara sebesar 355 juta rupiah. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Bali, yang bertugas mengawasi penggunaan dana publik, mendokumentasikan kerugian ini sebagai akibat

langsung dari tindakan penyalahgunaan dana bantuan tersebut. Kasus ini terungkap ketika BPKP menyoroti sejumlah pelanggaran yang terjadi. Salah satu pelanggaran yang mencolok adalah pemberian bantuan kepada pihak yang tidak berhak dan tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan BSU. Kepala Dusun Celuk Buluh diduga memberikan bantuan kepada kerabat dekatnya sendiri, melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan dalam penyaluran bantuan sosial. Dari 70 penerima bantuan, 38 di antaranya ternyata tidak memenuhi kriteria layak, menggambarkan sejauh mana dana tersebut disalahgunakan. Pentingnya integritas dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial semakin ditekankan melalui kasus ini. Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, menimbulkan dampak yang merugikan secara finansial bagi negara.

Implementasi pelaksanaan penyaluran bantuan Subsidi Upah (BSU) di Indonesia merupakan suatu proses yang senantiasa mendapat pemantauan dan pengawasan ketat dari pihak kementerian dan lembaga terkait. Kolaborasi dilakukan dengan instansi-instansi yang memiliki peran penting dalam menjalankan program ini, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), PT Pos Indonesia, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Keberhasilan penyaluran bantuan BSU sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan lembaga-lembaga terkait yang bertanggung jawab. Pemantauan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan BSU dilakukan secara rutin dan berkala oleh tim yang ditunjuk oleh masing-masing lembaga terkait. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu aspek yang menjadi fokus utama dalam pemantauan ini adalah kepatuhan terhadap prosedur penyaluran dan penggunaan dana yang telah disediakan. Pihak kementerian, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, memiliki peran aktif dalam memastikan bahwa implementasi penyaluran bantuan BSU berjalan sesuai dengan rencana. Mereka berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan program ini. Selain itu, pihak kementerian juga berperan dalam menyusun regulasi dan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan penyaluran bantuan BSU.

Dalam implementasinya, penyaluran bantuan BSU ini mendapatkan pemantauan setiap kali dilakukan penyaluran, dengan periode monitoring yang berlangsung selama satu kali penyaluran. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan lembaga terkait dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan program bantuan ini. Monitoring setiap penyaluran memberikan gambaran yang akurat tentang efektivitas program, memungkinkan adanya perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan BSU benar-benar bermanfaat bagi para pekerja yang membutuhkannya. Pentingnya pemantauan secara berkala menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan program bantuan BSU dengan transparan dan akuntabel. Dengan adanya kerjasama antara kementerian, lembaga-lembaga terkait, dan pihak terkait lainnya, diharapkan penyaluran bantuan Subsidi Upah dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pekerja Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang muncul, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19.

4. KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan bantuan subsidi upah (BSU) sebagai bagian dari strategi untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan. Program ini, yang ditujukan untuk masyarakat berpendapatan rendah, telah terbukti efektif dalam

mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini sebesar 96% pada tahun 2022. BSU diberikan kepada individu dengan pendapatan bulanan di bawah Rp 3.5 juta, dengan besaran bantuan sebesar Rp 600 ribu. Kriteria ini memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat penerima. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan dan mengoptimalkan kebijakan ini, termasuk memperluas cakupan program. Meskipun berhasil, kebijakan ini tidak lepas dari kritik, terutama terkait besaran bantuan yang dianggap belum mencukupi oleh beberapa pihak. Pemerintah berupaya melakukan penyesuaian kebijakan agar dapat memberikan dampak yang lebih maksimal.

Kesuksesan kebijakan ini juga menyoroti pentingnya pemisahan dan pengawasan ketat dalam lembaga-lembaga yang terlibat. Meskipun terdapat kasus korupsi di beberapa wilayah, hal ini tidak boleh mengaburkan manfaat yang diberikan oleh program BSU secara keseluruhan. Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi fokus strategi, dengan diterapkannya sistem pendaftaran dan distribusi bantuan secara online. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan transparansi dalam proses penyaluran bantuan. Evaluasi berkala dilakukan oleh Kemenaker untuk menilai dampak kebijakan BSU dan menyesuaikannya dengan kondisi ekonomi yang terus berubah. Selain itu, edukasi dan komunikasi aktif kepada masyarakat, termasuk pekerja dan pengusaha, menjadi strategi penting untuk memastikan pemahaman yang baik tentang syarat, prosedur, dan manfaat BSU. Dengan demikian, Kemenaker berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan dan efektivitas BSU agar dapat memberikan dukungan optimal kepada pekerja yang membutuhkan di tengah ketidakpastian ekonomi. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana bantuan juga menjadi kunci untuk mencegah penyelewengan di masa depan. Dengan pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan pembaruan yang berkelanjutan, diharapkan kebijakan BSU dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, terutama mereka yang membutuhkan bantuan social.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdekhoda, M., & Dehnad, A. (2023). Effective organizational factors in adopting e-Learning in education: extracting determinants and frameworks. *Journal of E-Learning and Knowledge Society*, 19(4), 1–8. <https://doi.org/10.20368/1971-8829/1135669>
- Anand, G., Atluri, A., Crawford, L., Pugatch, T., & Sheth, K. (2023). Improving school management in low and middle income countries: A systematic review. *Economics of Education Review*, 97. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2023.102464>
- Aprilia, Z. (2023). Pejabat Kemnaker Nyoman Tersangka KPK, Segini Hartanya. *Cnbc*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230819101956-4-464283/pejabat-kemnaker-nyoman-tersangka-kpk-segini-hartanya>
- Bierkamp, S., Nguyen, T. T., & Grote, U. (2023). Natural resource extraction and ethnic inequality in Dak Lak, Vietnam. *Environment and Development Economics*, 28(6), 559–579. <https://doi.org/10.1017/S1355770X23000062>
- Bizel, G. (2023). A Bibliometric Analysis: Metaverse in Education Concept. *Journal of Metaverse*, 3(2), 133–143. <https://doi.org/10.57019/jmv.1310768>
- Brevik, T. B., da Matta Calegari, L. R., Metcalfe, I. M., Laake, P., Maza, M., Basu, P., Todd, A., & Carvalho, A. L. (2023). Training health care providers to administer VIA as a screening test for cervical cancer: a systematic review of essential training components. *BMC Medical Education*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12909-023-04711-5>
- Brown, L. J., Reddy, T., Mannell, J., Burgess, R., Shai, N., Washington, L., Jewkes, R., & Gibbs, A. (2023). A latent class analysis of young women's co-occurring health risks in urban informal settlements in Durban, South Africa. *SSM - Mental Health*, 4. <https://doi.org/10.1016/j.ssmmh.2023.100273>
- Cai, Q. (2023). Public trust in the Chinese government and life satisfaction during the early stages of the COVID-19 pandemic. *International Review of Administrative Sciences*, 89(4), 1165–1185. <https://doi.org/10.1177/00208523231161297>
- Carraro, K. (2023). Multiliteracies and self-directed language learning in an academic setting. *European Journal of Language Policy*, 15(2), 245–272. <https://doi.org/10.3828/ejlp.2023.13>
- Cattan, S., Lereya, S. T., Yoon, Y., Gilbert, R., & Deighton, J. (2023). The impact of area level mental health interventions on outcomes for secondary school pupils: Evidence from the HeadStart programme in England. *Economics of Education Review*, 96. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2023.102425>
- Chen, L., Lu, Y., & Nanayakkara, A. (2023). Rural road connectivity and local economic Activity: Evidence from Sri Lanka's iRoad program. *Transport Policy*, 144, 49–64. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2023.09.022>
- Chowa, G., Masa, R., Manzanares, M., & Bilotta, N. (2023). A scoping review of positive youth development programming for vulnerable and marginalized youth in low- and middle-income countries. *Children and Youth Services Review*, 154. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.107110>
- Chuang, I.-T., Beattie, L., & Feng, L. (2023). Analysing the Relationship between Proximity to Transit Stations and Local Living Patterns: A Study of Human Mobility within a 15 Min Walking Distance through Mobile Location Data. *Urban Science*, 7(4). <https://doi.org/10.3390/urbansci7040105>
- CNBC. (2022). Cek Rekening! Bantuan Subsidi Upah Rp600 Ribu Hari Ini. *Cnbc*.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220909070501-4-370581/cek-rekening-bantuan-subsidi-upah-rp600-ribu-hari-ini-cair>

- Costa-Font, J., & Knust, N. (2023). Does exposure to democracy decrease health inequality? *Journal of Public Policy*, 43(4), 741–760. <https://doi.org/10.1017/S0143814X23000211>
- da Silva Neto, P. K., de Souza, M. T., de Gouvêa, A. R., da Mata, L. R. F., Luchesi, B. M., & Pessalacia, J. D. R. (2023). Health professionals' knowledge about ethical criteria in the allocation of resources in the COVID-19 pandemic. *Monash Bioethics Review*, 41(2), 181–197. <https://doi.org/10.1007/s40592-023-00174-y>
- Doumit, M. A. A., Khoury, M. N., Arevian, M., Al Khatib, G., & Fares, S. (2023). Effectiveness of an Educational Workshop on Palliative Care Knowledge in Lebanese Nurses. *Palliative Medicine Reports*, 4(1), 300–307. <https://doi.org/10.1089/pmr.2023.0026>
- Dragomir, V. D., & Dumitru, M. (2023). Two years into the COVID-19 pandemic: An analysis of learning outcomes and student engagement at an economics university. *Journal of Accounting Education*, 65. <https://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2023.100871>
- Fedeli, M., & Taylor, E. W. (2023). The impact of an active-learning designed faculty development program: A students' perspective of an Italian university. *Tuning Journal for Higher Education*, 11(1), 151–174. <https://doi.org/10.18543/tjhe.2513>
- Finlay, S. M., Boulton, A., Simpson, H., Fredericks, B., Roe, Y., Judd, J., Smith, J. A., Pender, J., & Cargo, M. (2023). A scoping review of commissioning practices used in the evaluation of Indigenous health and wellbeing programs: Protocol article. *Evaluation Journal of Australasia*, 23(4), 220–242. <https://doi.org/10.1177/1035719X231200050>
- George, T. K., Sharma, P., Joy, M., Seelan, G., Sekar, A., Gunasekaran, K., Abhilash, K. P. P., George, T., Rajan, S. J., & Hansdak, S. G. (2023). The economic impact of a COVID-19 illness from the perspective of families seeking care in a private hospital in India. *Dialogues in Health*, 2. <https://doi.org/10.1016/j.dialog.2023.100139>
- Grooms, S. B., Ward, G. M. V, & Kidder, T. R. (2023). Convergence at Poverty Point: A revised chronology of the Late Archaic Lower Mississippi Valley. *Antiquity*, 97(396), 1453–1469. <https://doi.org/10.15184/aqy.2023.155>
- Hartmann, J. M. K., Mukherjee, T. I., Khadra, M., Kaushal, N., Ei-Bassel, N., & Dasgupta, A. (2023). Perceived Discrimination and Poverty among Syrian Refugee Women in Jordan. *Refuge*, 39(2). <https://doi.org/10.25071/1920-7336.41107>
- Henaway, M. (2023). Amazon's distribution space: Constructing a "labour fix" through digital Taylorism and corporate Keynesianism. *ZFW - Advances in Economic Geography*, 67(4), 202–216. <https://doi.org/10.1515/zfw-2022-0017>
- Hendri, Z., Tu, J. C., Creativani, K., & Setiaji, R. S. (2023). University-Creative Industry Linkages in Art and Design Higher Education: Insights From Indonesia and Taiwan. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 23(20), 206–215. <https://doi.org/10.33423/jhetp.v23i20.6695>
- Hengevoss, A. (2023). Comprehensive INGO Accountability to Strengthen Perceived Program Effectiveness: A Logical Thing? *Voluntas*, 34(6), 1270–1283. <https://doi.org/10.1007/s11266-023-00556-0>
- Jung, S., & Hajjar, R. (2023). The livelihood impacts of transnational aid for climate change mitigation: Evidence from Ghana. *Forest Policy and Economics*, 155. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2023.103053>
- Karan, A., Negandhi, H., Kabeer, M., Zapata, T., Mairembam, D., De Graeve, H., Buchan, J., &

- Zodpey, S. (2023). Achieving universal health coverage and sustainable development goals by 2030: investment estimates to increase production of health professionals in India. *Human Resources for Health*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12960-023-00802-y>
- Kazakbaeva, R. (2023). Knowledge Base for Classroom Preparedness: Analyzing Initial English Language Teacher Education in Kyrgyzstan. *SAGE Open*, 13(4). <https://doi.org/10.1177/21582440231220734>
- Kemenaker. (2022). Bantuan Subsidi Upah (BSU). Kemenaker RI. <https://bsu.kemnaker.go.id/>
- Khusainov, R. V, Lisnik, A., Zatrochová, M., Babiuk, A. M., & Mashkov, K. Y. (2023). Economic and legal bases of the Carpathian Euroregion development during the COVID-19 pandemic (Hungary, Slovakia, Poland, Ukraine). *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/s13731-023-00303-1>
- Li, L., Song, H., Duan, M., Zhu, Y., & Luo, X. (2023). Impact of energy affordability on the decision-making of rural households in ecologically fragile areas of Northwest China regarding clean energy use. *Energy, Sustainability and Society*, 13(1). <https://doi.org/10.1186/s13705-023-00423-2>
- Lucero-Prisno, D. E., Shomuyiwa, D. O., Vicente, C. R., Méndez, M. J. G., Qaderi, S., Lopez, J. C., Mogessie, Y. G., Alacapa, J., Chamlagai, L., Ndayizeye, R., & Kinay, P. (2023). Achieving herd immunity in South America. *Global Health Research and Policy*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s41256-023-00286-2>
- Matulová, M. (2023). Ranking Of European Universities By Dea-Based Sustainability Indicator. *Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science*, 16(4), 287–298. <https://doi.org/10.7160/eriesj.2023.160403>
- McCosker, A., Critchley, C., Walshe, J., Tucker, J., & Suchowerska, R. (2023). Accounting for diversity in older adults' digital inclusion and literacy: The impact of a national intervention. *Ageing and Society*, 43(11), 2629–2649. <https://doi.org/10.1017/S0144686X21001550>
- Moffitt, S. L., Willse, C., Smith, K. B., & Cohen, D. K. (2023). Centralization and Subnational Capacity: The Struggle to Make Federalism Work Equitably in Public Education. *Perspectives on Politics*, 21(4), 1283–1303. <https://doi.org/10.1017/S1537592721002012>
- Mozer, C. L., Orsbon, C. P., Chopra, K., Markham, L. R., & Kostas, T. (2023). The speech-language pathology clinical experience: An experiential interprofessional session for second-year medical students. *Journal of Interprofessional Education and Practice*, 33. <https://doi.org/10.1016/j.xjep.2023.100676>
- Muhamad, N. (2023). Indeks Pembangunan Manusia RI Terus Naik hingga 2023. Databok Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/16/indeks-pembangunan-manusia-ri-terus-naik-hingga-2023>
- Mullan, K. (2023). Agency Information Collection Activities; Comment Request; Work Colleges Expenditure Report. *Federal Register*, 88(232), 84309–84310. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85179451078&partnerID=40&md5=a95f90f98878e7910466e3fcefcd60f0>
- Nciweni, N., Matsilele, T., & Abrahams, R. (2023). THE ROLE OF DIGITAL TRANSFORMATION IN ENHANCING COMMUNICATION: A CASE STUDY OF OR TAMBO DISTRICT MUNICIPALITY IN SOUTH AFRICA. *Communitas*, 28, 166–176. <https://doi.org/10.38140/com.v28i.7614>
- Nieto-Gonzalez, I. L., Rodriguez-Donate, C. M., & Guirao-Pérez, G. (2023). Tobacco

- consumption in Spain: Individual risk profiles. *Tobacco Induced Diseases*, 21(December). <https://doi.org/10.18332/tid/175044>
- Obeta, M. C., Okafor, U. P., & Nnoli, C. I. (2023). Provision of post construction support (PCS) services to state water authorities in Nigeria: Constraints and the way forward. *GeoScape*, 17(2), 185–194. <https://doi.org/10.2478/geosc-2023-0012>
- Ostrovskaya, M., Ostrovski, O., & Margitich, K. (2023). Peculiarities of Professional Training of Future Teachers for Innovative Educational Activities in an Intercultural Environment. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 23(20), 65–75. <https://doi.org/10.33423/jhetp.v23i20.6688>
- Peng, C., & Wang, J. S.-H. (2023). Local Integration of Urban Rural Social-assistance Programmes in China: What Are the Driving Forces? *China Quarterly*, 256, 886–904. <https://doi.org/10.1017/S0305741023001030>
- Pringle, G., Boddy, J., Slattey, M., & Harris, P. (2023). Adventure Therapy for Adolescents with Complex Trauma: A Scoping Review and Analysis. *Journal of Experiential Education*, 46(4), 433–454. <https://doi.org/10.1177/10538259221147195>
- Quyet, P. V., Hoc, L. H., & Hai, P. T. T. (2023). Autonomy Governance Transformation in the Higher Education Institutions Towards the Typical Models in Vietnam. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 23(20), 1–14. <https://doi.org/10.33423/jhetp.v23i20.6685>
- Ravalier, J. M., Allen, R., & McGowan, J. (2023). Social Worker Working Conditions and Psychological Health: A Longitudinal Study. *British Journal of Social Work*, 53(8), 3818–3837. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcad144>
- Santanna, D. (2023). Providing Consumer Credit to Low-Income Populations in Brazil – The Case of Complexo da Penha. *Social Sciences*, 12(12). <https://doi.org/10.3390/socsci12120691>
- She, C., Jiang, M., Du, J., Xu, J., & Zhu, X. (2023). What happened in COVID to conflict: Re-examination of financial inclusion and green development nexus in China natural resource sector. *Resources Policy*, 87. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104280>
- Shiljas, K., Kumar, D., & Bashir, H. A. (2023). Nexus between Twitter-based sentiment and tourism sector performance amid COVID-19 pandemic. *Tourism Economics*, 29(8), 2200–2205. <https://doi.org/10.1177/13548166221123102>
- Skare, M., Gavurova, B., & Sinkovic, D. (2023). Unraveling the Dynamics of Inflation Persistence: A Long-Memory Analysis of Headline Inflation Convergence and Divergence in European Economies. *Contemporary Economics*, 17(4), 406–423. <https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.519>
- Sullivan, J., Zhao, Y., & Wang, W. (2023). China's Livestreaming Local Officials: An Experiment in Popular Digital Communications. *China Quarterly*, 256, 1036–1052. <https://doi.org/10.1017/S030574102300070X>
- Tamura, M., Takasugi, T., Nakamura, M., Yanagi, N., Nakagomi, A., Sato, K., Kondo, K., & Ojima, T. (2023). Family Pharmacy and Medication Adherence Among Older Adults in Japan: A Cross-Sectional Study of JAGES 2019. *The Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences*, 78(12), 2122–2130. <https://doi.org/10.1093/geronb/gbad147>
- Tihelková, A. (2023). Selling Austerity to the Public: Analysing the Rhetoric of the UK Government on its Welfare Cuts. *American and British Studies Annual*, 16, 47–58. <https://doi.org/10.46585/absa.2023.16.2501>

- Tran-Thi-Thanh, T., & Nguyen-Thi-phuong, A. (2023). Exploring the Mechanisms Underlying Firms' Intent to Adopt Circular Business Models. *Contemporary Economics*, 17(4), 389–405. <https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.518>
- Tsai, J., Hird, R., & Collier, A. (2023). Self-reported Impacts of the COVID-19 Pandemic and Economic Inflation on the Well-being of Low-income U.S. Veterans. *Journal of Community Health*, 48(6), 970–974. <https://doi.org/10.1007/s10900-023-01267-9>
- Valentine, S. (2023). Agency Information Collection Activities; Submission to the Office of Management and Budget for Review and Approval; Comment Request; School Pulse Panel 2024–25 Preliminary Field Activities. *Federal Register*, 88(232), 84310–84311. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85179455264&partnerID=40&md5=e81261422413114e640bdd8fd3177a25>
- Vankov, D., & Vankov, B. (2023). Entrepreneurship education 2-in-1: Helping young Bulgarians become more entrepreneurial in a 10-month parallel-group randomized trial. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/s13731-023-00331-x>
- Wartiainen, F. (2023). Time for “environmentarian corridors”? Investigating the concept of safe passage to protect the environment during armed conflict. *International Review of the Red Cross*, 105(924), 1365–1391. <https://doi.org/10.1017/S1816383123000309>
- White, P. (2023). A Journey into Other Faiths: The Experience of a Pentecostal Theologian. *Interreligious Studies and Intercultural Theology*, 7(1), 275–288. <https://doi.org/10.1558/isit.26887>
- Yurrebaso, G., Arostegui, I., & Villaescusa, M. (2023). Transition from work integration social enterprises to ordinary employment in situations of low employability: results of an intervention programme. *Social Enterprise Journal*, 19(5), 502–518. <https://doi.org/10.1108/SEJ-11-2022-0109>
- Zhang, Z., Hou, Y., Zhang, Z., & Li, M. (2023). Natural resources, carbon neutrality, and fiscal federalism: Implications for G7 countries amid rising Covid-19 concerns. *Resources Policy*, 87. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104223>